



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 261 /RB.06/2019

Jakarta, 30 Desember 2019

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi Tahun 2019

Yth. **Sekretaris Jenderal MPR RI**

di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan cakupan evaluasi hingga ke unit kerja yang tidak diatur pada pedoman sebelumnya.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI di tahun 2019 adalah **72,02** atau kategori **"BB"** dengan rincian:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
<b>A</b>	<b>Pengungkit</b>			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,43	3,82
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,75	4,06
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,93	4,05
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,09	3,15

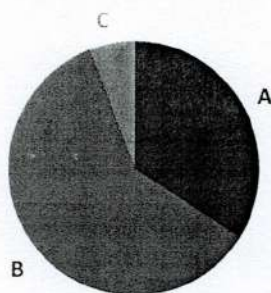
No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,52	12,57
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,60	3,68
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,87	6,22
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,86	3,96
	<b>Sub Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>40,05</b>	<b>41,51</b>

B	Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,41	8,54
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,32	4,46
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,04	6,28
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,53	8,23
	<b>Sub Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>30,29</b>	<b>30,51</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100,00</b>	<b>70,35</b>	<b>72,02</b>

2. Beberapa catatan yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk menjalankan program reformasi birokrasi adalah:
- a. Sekretariat Jenderal MPR RI telah memiliki nilai-nilai organisasi yaitu HARMONI (Humanis, Akuntabel, Responsif, Melayani, Obyektif, Netral, Integritas) namun belum semua pegawai paham dan dapat menginternalisasikan nilai-nilai organisasi ini dengan baik;
  - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilakukan secara terpadu. Pelaksanaan reformasi birokrasi lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kelompok kerja (Pokja) tim reformasi birokrasi yang dibentuk. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang ada di unit kerja juga masih belum banyak dipantau. Hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing pokja dan tim reformasi birokrasi di unit kerja belum terintegrasi sehingga dapat mewujudkan perbaikan signifikan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Sekretariat Jenderal MPR RI;
  - c. Sekretariat Jenderal MPR RI sudah melaksanakan restrukturisasi organisasi namun belum terdapat hasil apakah restrukturisasi tersebut dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI secara keseluruhan;
  - d. Pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan namun belum dapat mewujudkan unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
  - e. Standar pelayanan, pelayanan terpadu serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat belum diterapkan secara merata pada seluruh unit kerja pelayanan. Pelayanan publik juga masih belum banyak didukung dengan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemberian pelayanan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI.

3. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil, sebagai berikut:

a. Hasil survei internal terhadap 104 orang responden pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI atas integritas jabatan menunjukkan terdapat 12 orang pegawai atau 11,54% responden yang tidak memahami tugas fungsi yang



harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (C). Sebanyak 57 orang atau 54,81% responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan, namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (B). Hanya 35 orang pegawai atau 33,65% responden yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (A).

b. Survei internal terhadap integritas organisasi Tahun 2019 menunjukkan indeks 3,00 dalam skala 0-4 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Indeks 2018	Indeks 2019
1.	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,07	2,97
2.	Integritas Kinerja Terkait Pengelolaan SDM	3,19	3,15
3.	Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran	3,19	3,00
4.	Intergitas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan Norma	3,20	3,00
<b>Indeks Integritas Organisasi</b>		<b>3,16</b>	<b>3,00</b>

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Hasil survei tahun 2019 tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang sebesar 3,16. Hal ini dapat diartikan bahwa persepsi pejabat/pegawai terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI tidak mengalami kemajuan yang berarti. Indeks integritas ideal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 adalah 3,6.

c. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Sekretariat Jenderal MPR RI menunjukkan hasil sebagai berikut:

1) Hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,29 dalam skala 4 sedangkan hasil survei persepsi pelayanan Sekretariat Jenderal MPR RI tahun sebelumnya menunjukkan indeks 3,41. Hasil survei tersebut menunjukkan masih terdapat selisih atau *gap* antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.

- 2) Hasil survei persepsi anti korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,59 dalam skala 4 sedangkan hasil survei persepsi anti korupsi Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun sebelumnya menunjukkan indeks 3,45. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.
4. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu:
    - a. Menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk periode tahun 2020-2024 yang terintegrasi dengan Renstra Sekretariat Jenderal MPR RI 2020-2024 serta selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024;
    - b. Menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai pada unit kerja terkecil, tidak hanya di tim reformasi birokrasi pusat saja. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi juga sangat diperlukan dalam memantau sejauh mana reformasi birokrasi sudah berjalan. Peran pimpinan juga menjadi sangat penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
    - c. Menginternalisasikan arah perubahan yang dicanangkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI secara berjenjang kepada seluruh pegawai di seluruh unit kerja, sehingga seluruh pegawai dapat memahami arah perubahan dan setiap pegawai juga dapat terlibat dalam proses perubahan. Keterlibatan setiap pegawai akan meningkatkan pemahaman pegawai akan arti pentingnya reformasi birokrasi;
    - d. Meningkatkan kapasitas Tim Asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik;
    - e. Menyusun uraian tugas (*job description*) untuk seluruh jenis jabatan dan menyusun Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI sehingga setiap pengisian jabatan didasarkan kepada pemenuhan sesuai standar kompetensi jabatan tersebut;
    - f. Mempercepat terlaksananya merit sistem dengan menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Permenpanrb Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara seperti menyusun pola karir dan manajemen talenta;
    - g. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan sebagainya untuk memperkuat profesionalisme aparatur;

- h. Melakukan monitoring atas rencana aksi dalam pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang diselaraskan secara berjenjang serta menyusun peta strategis berupa struktur yang menggambarkan keselarasan dalam mencapai hasil (sasaran strategis) melalui program/kegiatan yang dirasa tepat. Peta strategis tersebut sebaiknya dilengkapi dengan anggaran yang mendukung sehingga melalui dokumen ini akan tergambar Anggaran Berbasis Kinerja (*performance based budgeting*);
- i. Mengoptimalkan pengendalian internal pada setiap jenjang organisasi. Tujuan pengendalian internal ini adalah untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta meminimalkan potensi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- j. Mendorong unit kerja percontohan Zona Integritas agar terwujud percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja dan satuan kerja;
- k. Mendorong unit kerja untuk mengembangkan inovasi yang dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan murah (tanpa biaya). Inovasi yang dikembangkan juga seharusnya dapat meningkatkan pencapaian kinerja di unit kerja atau di Sekretariat Jenderal MPR RI secara umum.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Kami menghargai upaya Sekretaris Jenderal MPR RI beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan perbaikan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN);
3. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional;
4. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.